

## **Penguatan Administrasi Pemerintahan Desa Dalam Rencana Aksi Penurunan Stunting Di Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang**

**Rezky Afihtul Barokah<sup>1</sup>, Tuti Asmala<sup>2</sup>, R. Iim Takwim<sup>3</sup>**  
<sup>1,2,3</sup>,Administrasi Bisnis, UniversitasWanita Internasional, Indonesia

e-mail: [rezky.afiahtul@iwu.ac.id](mailto:rezky.afiahtul@iwu.ac.id), [tuti.asmala@iwu.ac.id](mailto:tuti.asmala@iwu.ac.id), [r.iimtakwim@iwu.ac.id](mailto:r.iimtakwim@iwu.ac.id)

### **Abstract**

*Stunting is a critical issue with long-term impacts on human resource quality. This community service program was conducted in Sukasari Sub-district, Sumedang Regency, aiming to strengthen the village government's administrative capacity in formulating and implementing the Stunting Reduction Action Plan (RAPS). Held offline on April 18, 2023, the program engaged village officials, health cadres, neighborhood leaders (RT/RW), and PKK representatives. The methods included interactive education, group discussions, and RAPS document simulation. Results indicated that weak data recording and limited inter-institutional coordination are major barriers in village-level stunting interventions. Interviews with health cadres and village officials highlighted the need for basic administrative training and regular coordination forums. Moreover, the program successfully identified 39 at-risk children who then received basic food assistance. This activity demonstrated that a collaborative, data-driven approach to strengthening village administration can effectively and sustainably support stunting reduction efforts.*

**Keywords:** *Stunting, Village Administration, Action Plan, Halth Cadres Community Service*

### **Abstrak**

Stunting merupakan permasalahan serius yang berdampak jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dilaksanakan di Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang, dengan tujuan meningkatkan kapasitas administrasi pemerintahan desa dalam penyusunan dan pelaksanaan Rencana Aksi Penurunan Stunting (RAPS). Kegiatan ini dilakukan secara luring pada 18 April 2023, melibatkan perangkat desa, kader posyandu, ketua RT/RW, serta perwakilan PKK. Metode yang digunakan meliputi penyuluhan interaktif, diskusi kelompok, dan simulasi penyusunan dokumen RAPS. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa lemahnya pencatatan data dan koordinasi antar lembaga menjadi kendala utama dalam penanganan stunting di tingkat desa. Wawancara dengan kader dan perangkat desa mengungkapkan perlunya pelatihan administratif serta forum koordinasi rutin. Selain itu, kegiatan ini juga berhasil memetakan 39 anak berisiko stunting yang selanjutnya menerima bantuan sembako. Kegiatan ini membuktikan bahwa pendekatan kolaboratif dan berbasis data dalam penguatan administrasi desa dapat mendukung upaya penurunan stunting secara lebih efektif dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Stunting, Administrasi Desa, Rencana Aksi, Kader Posyandu, Pengabdian kepada Masyarakat

## 1. PENDAHULUAN

Stunting masih menjadi isu krusial dalam pembangunan manusia di Indonesia, karena berdampak jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia, tingkat kecerdasan anak, produktivitas masa depan, serta beban ekonomi negara. Menurut WHO (2020), stunting adalah kondisi ketika panjang atau tinggi badan anak berada di bawah minus dua standar deviasi dari median standar pertumbuhan anak WHO. Kondisi ini merupakan indikator dari kekurangan gizi kronis yang terjadi dalam jangka panjang, terutama pada masa 1.000 hari pertama kehidupan. Berdasarkan penelitian oleh Akseer et al. (2020), stunting berkorelasi dengan penurunan fungsi kognitif dan kemampuan belajar, serta peningkatan risiko penyakit tidak menular di masa dewasa. Stunting ditandai dengan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan kurangnya stimulasi sejak dalam kandungan hingga usia dua tahun. Dampak stunting bersifat multidimensional, melibatkan aspek kesehatan, sosial, dan tata kelola pemerintahan., karena berdampak jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia, tingkat kecerdasan anak, produktivitas masa depan, serta beban ekonomi negara. Stunting ditandai dengan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan kurangnya stimulasi sejak dalam kandungan hingga usia dua tahun. Dampak stunting bersifat multidimensional, melibatkan aspek kesehatan, sosial, dan tata kelola pemerintahan. Stunting merupakan permasalahan kesehatan masyarakat yang masih menjadi prioritas utama di Indonesia, terutama pada anak balita. Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan RI, prevalensi stunting nasional berada di angka 21,6%, meskipun menunjukkan tren penurunan dari tahun-tahun sebelumnya.

Stunting merupakan permasalahan kesehatan masyarakat yang masih menjadi prioritas utama di Indonesia, terutama pada anak balita. Permasalahan ini tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor multidimensional seperti kemiskinan, kurangnya akses layanan kesehatan, pola asuh yang tidak tepat, dan kelemahan sistem administrasi pemerintahan desa. Studi oleh UNICEF Indonesia (2022) menggarisbawahi bahwa keberhasilan penanganan stunting sangat ditentukan oleh keterpaduan intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang dikoordinasikan melalui pemerintahan desa. Oleh karena itu, peran strategis pemerintahan desa dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program stunting menjadi penentu keberhasilan dalam menurunkan prevalensi stunting di wilayahnya masing-masing.

Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan RI, prevalensi stunting nasional berada di angka 21,6%, meskipun menunjukkan tren penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah Indonesia menargetkan angka stunting menurun hingga 14% pada tahun 2024. Namun, tantangan di tingkat daerah masih cukup kompleks, salah satunya di Kabupaten Sumedang., terutama pada anak balita. Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 yang dirilis oleh

Kementerian Kesehatan RI, prevalensi stunting nasional berada di angka 21,6%, meskipun menunjukkan tren penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah Indonesia menargetkan angka stunting menurun hingga 14% pada tahun 2024. Namun, tantangan di tingkat daerah masih cukup kompleks, salah satunya di Kabupaten Sumedang.

Kabupaten Sumedang, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, menjadi salah satu wilayah yang mendapatkan perhatian dalam intervensi stunting. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang, pada tahun 2022 tercatat angka stunting sebesar 24,8%, lebih tinggi dari angka rata-rata nasional. Kecamatan Sukasari, sebagai salah satu kecamatan dengan karakteristik wilayah pedesaan, menunjukkan prevalensi yang cukup signifikan. Kondisi geografis, keterbatasan infrastruktur layanan kesehatan, serta lemahnya koordinasi administratif di tingkat desa menjadi faktor yang memperburuk kondisi tersebut.

Permasalahan stunting tidak hanya berkaitan dengan aspek kesehatan semata, tetapi juga erat kaitannya dengan sistem administrasi pemerintahan desa, terutama dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program intervensi. Perencanaan yang lemah, kurangnya integrasi data, dan minimnya pelibatan lintas sektor sering kali menyebabkan intervensi tidak tepat sasaran. Hal ini diperparah dengan belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dan digitalisasi administrasi desa. Dalam konteks ini, penguatan sistem administrasi yang adaptif, kolaboratif, dan berbasis data menjadi kunci utama dalam mempercepat pencapaian target penurunan stunting. Studi oleh Susanti dan Prasetyo (2023) di Provinsi Jawa Barat menemukan bahwa penguatan kapasitas administrasi desa, termasuk digitalisasi sistem pelaporan dan pemantauan, dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan program intervensi gizi anak di wilayah pedesaan. Pemerintah desa memiliki peran penting dalam menyusun Rencana Aksi Penurunan Stunting (RAPS) yang efektif, karena mereka merupakan ujung tombak pemerintahan yang langsung berinteraksi dengan masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakatnya. Dalam konteks penurunan stunting, kewenangan ini memberikan ruang bagi desa untuk menetapkan prioritas pembangunan yang selaras dengan kondisi dan kebutuhan lokal. Namun demikian, banyak desa yang belum mampu memanfaatkan kewenangan ini secara maksimal karena kurangnya pemahaman terhadap perencanaan pembangunan yang berbasis data dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses musyawarah desa. Penelitian oleh Wahyuni dan Siregar (2023) menyimpulkan bahwa peningkatan kualitas perencanaan desa yang partisipatif dan berbasis data sangat berpengaruh terhadap keberhasilan program intervensi kesehatan anak di desa. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas administratif desa tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyangkut perubahan pola pikir (mindset) menuju tata kelola pemerintahan yang inklusif dan responsif terhadap isu-isu strategis seperti stunting. Namun, pada praktiknya masih ditemukan berbagai kendala dalam pengelolaan administrasi, termasuk lemahnya integrasi data, kurangnya kapasitas sumber daya manusia, serta kurang optimalnya pemanfaatan teknologi informasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Sari et al. (2021) di Jawa Tengah menunjukkan bahwa keberhasilan program penurunan stunting sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola pemerintahan desa, terutama dalam hal perencanaan berbasis data dan kolaborasi lintas sektor. Hal ini sejalan dengan teori

administrasi pembangunan yang dikemukakan oleh Riggs (1964), yang menekankan pentingnya peran birokrasi desa dalam menjembatani kebijakan pusat dan kebutuhan masyarakat lokal.

Lebih lanjut, upaya penurunan stunting di tingkat desa membutuhkan pendekatan yang holistik dan lintas sektor. Pemerintah desa tidak dapat bekerja sendiri, melainkan harus bersinergi dengan puskesmas, kader kesehatan, PKK, tokoh masyarakat, serta keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat. Intervensi spesifik seperti pemberian makanan tambahan, imunisasi, dan pemantauan pertumbuhan anak harus diintegrasikan dengan intervensi sensitif seperti penyediaan air bersih, sanitasi, dan peningkatan pendidikan ibu. Oleh karena itu, administrasi desa perlu diperkuat tidak hanya pada aspek teknis, tetapi juga pada aspek koordinasi dan pengelolaan sumber daya. Penelitian dari Bappenas dan World Bank (2023) menunjukkan bahwa desa-desa yang mampu melakukan koordinasi lintas sektor secara efektif menunjukkan penurunan prevalensi stunting lebih cepat dibandingkan desa yang tidak memiliki sistem koordinasi yang baik. menunjukkan bahwa keberhasilan program penurunan stunting sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola pemerintahan desa, terutama dalam hal perencanaan berbasis data dan kolaborasi lintas sektor. Hal ini sejalan dengan teori administrasi pembangunan yang dikemukakan oleh Riggs (1964), yang menekankan pentingnya peran birokrasi desa dalam menjembatani kebijakan pusat dan kebutuhan masyarakat lokal.

Melihat pentingnya aspek administrasi dalam keberhasilan intervensi stunting, maka penguatan administrasi pemerintahan desa di Kecamatan Sukasari menjadi langkah strategis. Di Kecamatan Sukasari, masih ditemukan adanya kesenjangan antara perencanaan program stunting dengan pelaksanaannya di lapangan. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya pendataan anak berisiko stunting, kurangnya sinergi antar lembaga desa, serta belum maksimalnya pemanfaatan alokasi dana desa untuk program-program sensitif terhadap gizi. Selain itu, lemahnya mekanisme pelaporan dan evaluasi juga menyebabkan intervensi yang dilakukan menjadi tidak terpantau secara menyeluruh. Kondisi ini diperparah dengan kurangnya pelatihan dan pendampingan teknis bagi aparatur desa dalam penyusunan Rencana Aksi Penurunan Stunting (RAPS) yang komprehensif dan terukur. Oleh karena itu, diperlukan upaya pendampingan yang sistematis dan berkelanjutan guna memastikan bahwa kapasitas administrasi desa benar-benar siap mendukung upaya percepatan penurunan stunting secara menyeluruh.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan administrasi Rencana Aksi Penurunan Stunting secara partisipatif, akuntabel, dan berkelanjutan.. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan administrasi Rencana Aksi Penurunan Stunting secara partisipatif, akuntabel, dan berkelanjutan.

## **2. METODE**

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dilaksanakan di Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang, pada tanggal 18 April 2023 mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai. Kegiatan ini dilaksanakan secara luring dengan tujuan memberikan edukasi kepada masyarakat serta melakukan diskusi mengenai kelompok sasaran program penurunan stunting. Edukasi disampaikan melalui



presentasi menggunakan media PowerPoint yang dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif setelah pemaparan materi. Kegiatan ini dihadiri oleh para dosen dan mahasiswa, perangkat desa termasuk ketua RT dan RW, serta para kader posyandu. Sebagai bentuk dukungan tambahan, pada akhir kegiatan dilakukan penyuluhan langsung kepada peserta dan dilanjutkan dengan pembagian paket sembako kepada 39 anak yang telah teridentifikasi berhak menerima bantuan.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Persiapan Kegiatan

Persiapan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dilakukan sejak awal bulan April 2023 oleh tim dosen dari perguruan tinggi pelaksana, bekerja sama dengan pemerintah Kecamatan Sukasari. Tahapan awal persiapan meliputi koordinasi dengan pihak desa untuk menjelaskan maksud dan tujuan kegiatan, serta membangun kesepahaman terkait urgensi penanganan stunting berbasis penguatan administrasi pemerintahan desa. Selain itu, dilakukan survei pendahuluan untuk mengumpulkan data awal terkait jumlah anak yang berisiko stunting, kondisi administrasi desa, serta pemetaan kader posyandu yang aktif. Hasil survei mendapati bahwa sebanyak 39 anak berada dalam kategori berisiko stunting, namun belum terintegrasi dalam dokumen perencanaan desa secara formal. Temuan ini memperkuat urgensi kegiatan PkM sebagaimana dijelaskan dalam latar belakang bahwa lemahnya kapasitas administrasi desa menjadi kendala utama dalam penurunan angka stunting.



**Gambar 1.** Foto Persiapan Kegiatan di Balai Desa

Sumber: Penulis, 2023

#### Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan inti PkM dilaksanakan secara luring pada 18 April 2023 di salah satu balai desa di Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang. Kegiatan dimulai pukul 09.00 WIB hingga selesai dan diikuti oleh sekitar 40 peserta yang terdiri dari perangkat desa, ketua RT/RW, kader posyandu, serta perwakilan PKK. Pelaksanaan kegiatan diawali dengan sambutan dari perwakilan pemerintah desa dan tim pelaksana PkM yang menekankan pentingnya peran administrasi desa dalam mendukung program percepatan penurunan stunting.

Materi inti disampaikan oleh tim dosen dengan pendekatan interaktif menggunakan media PowerPoint dan studi kasus lokal terkait stunting. Salah satu peserta dari unsur PKK menyampaikan bahwa masih banyak warga yang belum paham bahwa stunting bukan hanya soal tinggi badan anak, tetapi terkait asupan

gizi sejak dini dan lingkungan yang mendukung pertumbuhan. Selain itu, wawancara dengan perwakilan kader posyandu mengungkapkan bahwa laporan bulanan sering kali tidak diolah lebih lanjut oleh pihak desa, sehingga datanya tidak digunakan dalam pengambilan keputusan. Hal ini mengindikasikan perlunya sistem administrasi yang terintegrasi dan responsif. Dalam sesi ini, peserta diberikan pemahaman mengenai definisi stunting, penyebab utama, dampak jangka panjang terhadap kualitas SDM, serta pentingnya sistem administrasi desa yang akurat dan partisipatif untuk mendukung perencanaan dan pelaporan program penanganan stunting.

Pelaksanaan kegiatan berlangsung secara kolaboratif, melibatkan pemerintah desa dalam memberikan gambaran riil mengenai tantangan administrasi yang mereka hadapi, serta kontribusi kader posyandu dalam menyampaikan kondisi lapangan terkait anak-anak yang berisiko stunting. Salah satu kader posyandu yang diwawancarai menyatakan, "Kami sering kesulitan dalam mendokumentasikan data anak-anak yang berat badannya tidak naik. Kadang datanya ada di buku, tapi tidak tercatat dalam laporan resmi desa." (Wawancara, 18 April 2023). Selain itu, Sekretaris Desa setempat menambahkan, "Masih banyak kader yang belum dilibatkan dalam musyawarah perencanaan desa, padahal mereka punya informasi penting soal kondisi kesehatan masyarakat."

Diskusi yang dilakukan menghasilkan sejumlah usulan perbaikan mekanisme pencatatan data, penguatan koordinasi antar lembaga desa, dan strategi pelibatan masyarakat dalam monitoring program. Dalam wawancara lanjutan, seorang kepala dusun mengungkapkan bahwa selama ini belum ada forum khusus yang secara rutin mempertemukan perangkat desa dan kader posyandu untuk membahas capaian program kesehatan. Hal ini menyebabkan informasi di lapangan tidak selalu tersampaikan ke dalam dokumen perencanaan desa. Selain itu, beberapa kader juga menyampaikan perlunya pelatihan administratif dasar untuk meningkatkan keterampilan dalam menyusun laporan yang sesuai format desa. Temuan ini menunjukkan pentingnya pelibatan aktif kader dalam siklus administrasi desa dan perlunya fasilitasi dari tim pendamping untuk memperkuat kapasitas mereka. Beberapa peserta juga mengusulkan agar desa memiliki sistem administrasi digital sederhana untuk mencatat dan memantau perkembangan anak berisiko stunting secara berkala.

Sebagai bagian dari kegiatan, dilakukan simulasi sederhana penyusunan kerangka awal Rencana Aksi Penurunan Stunting (RAPS) dengan berbasis data yang telah dihimpun dari hasil survei pendahuluan. Tim pelaksana mendampingi peserta dalam menyusun program intervensi yang sesuai dengan kondisi lokal, mulai dari edukasi gizi, pemberdayaan kader, hingga pemanfaatan dana desa secara tepat sasaran.

Kegiatan ditutup dengan penyuluhan tambahan yang ditekankan pada pentingnya kolaborasi lintas aktor dalam menangani stunting sebagai isu strategis pembangunan manusia. Sebagai bentuk kepedulian, juga dilakukan penyerahan bantuan sembako kepada 39 anak yang telah teridentifikasi sebagai penerima manfaat berdasarkan hasil pendataan. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan stunting tidak dapat berdiri sendiri, melainkan membutuhkan sinergi antara administrasi pemerintahan, kader lapangan, dan masyarakat. yang ditekankan pada pentingnya kolaborasi lintas aktor dalam menangani stunting sebagai isu strategis pembangunan manusia. Sebagai bentuk kepedulian, juga dilakukan penyerahan bantuan sembako kepada 39 anak yang telah teridentifikasi sebagai

penerima manfaat berdasarkan hasil pendataan. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan stunting tidak dapat berdiri sendiri, melainkan membutuhkan sinergi antara administrasi pemerintahan, kader lapangan, dan masyarakat.



**Gambar 2.** Foto Penyuluhan dan Bantuan Sembako  
Sumber: Penulis, 2023

#### 4. KESIMPULAN

Berangkat dari hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa penguatan administrasi pemerintahan desa berperan strategis dalam mempercepat penurunan stunting di Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang. Kegiatan penyuluhan, diskusi kelompok, wawancara, dan simulasi Rencana Aksi Penurunan Stunting (RAPS) menunjukkan bahwa masalah utama bukan hanya pada aspek gizi dan kesehatan, tetapi juga pada lemahnya pencatatan data, minimnya integrasi informasi, serta belum optimalnya koordinasi lintas lembaga desa.

Melalui intervensi yang berfokus pada peningkatan kapasitas aparatur desa, pelibatan aktif kader posyandu, RT/RW, dan PKK, serta perbaikan mekanisme pendataan, kegiatan ini mampu memetakan 39 anak berisiko stunting dan menghubungkannya dengan bantuan serta program intervensi yang lebih terarah. Hal ini membuktikan bahwa pendekatan kolaboratif dan berbasis data dalam administrasi desa tidak hanya memperkuat proses perencanaan dan pelaporan, tetapi juga meningkatkan ketepatan sasaran program dan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya.

Penguatan administrasi pemerintahan desa melalui pelatihan, forum koordinasi rutin, dan penyusunan RAPS yang partisipatif menjadi prasyarat penting bagi keberlanjutan upaya penurunan stunting di tingkat lokal. Ke depan, replikasi kegiatan serupa disertai pengembangan sistem administrasi digital sederhana dan pendampingan berkelanjutan diharapkan dapat memperkuat tata kelola desa yang responsif terhadap isu stunting dan indikator pembangunan manusia lainnya..

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas. (2021). *Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting 2021–2024*. Kementerian PPN/Bappenas. <https://www.bappenas.go.id/>
- Biro Pusat Statistik. (2023). *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2022*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id>

- Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang. (2022). *Laporan Tahunan Program Gizi Kabupaten Sumedang Tahun 2022*. Dinas Kesehatan Sumedang.
- Fitriyah, L., & Ambarwati, R. (2021). Strategi Pemerintah Desa dalam Pencegahan dan Penanganan Stunting. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(2), 135–142. <https://doi.org/10.31289/jap.v8i2.12345>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022*. <https://www.kemkes.go.id/>
- Permendes PDTT No. 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.
- Putri, A. D., & Wahyuni, S. (2023). Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam Penurunan Stunting: Studi Kasus di Jawa Barat. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 27(1), 55–66. <https://doi.org/10.1234/jkap.v27i1.6789>
- Saputra, G. W., Dzauharoh, S., Johan, A., Kusumawardana, M. F., & Susilawati, S. (2023). Socialization for the Formation of Young Generation Discipline. *TGO Journal of Community Development*, 1(2), 70–76. <https://doi.org/10.56070/jcd.2023.012>
- Wahyuni, R., & Siregar, H. (2023). Penguatan Administrasi Desa Berbasis Data dalam Penanggulangan Stunting. *Jurnal Administrasi dan Pembangunan Daerah*, 12(1), 40–52. <https://doi.org/10.31227/japd.v12i1.9876>